



## Perlu Kajian Teknis Jaringan Bersama

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema Pembangunan dan Penggunaan Bersama Infrastruktur Pasif Telekomunikasi, di Ruang Yudhistira Balai Kota, Jumat (8/2).

Pada kesempatan tersebut, Direktur Pengembangan Pita Lebar, Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Benyamin Sura menjelaskan bahwa perlu kajian teknis untuk merealisasikan pembangunan jaringan bersama. "Nantinya bagaimana pemkot menyusun perwal mengenai *ducting*, mulai dari *template*, galian kabel, kedalaman,

ketinggian menara, dan sebagainya," bebernya.

Hal tersebut lanjutnya, untuk mendukung layanan cepat komunikasi dalam hal ini yang menyangkut pembangunan jaringan. "*Broadband* saat ini masih lambat. *Fixed broadband* ditunggu masyarakat dan pebisnis karena lebih bagus daripada seluler. Seluler 1GB harganya Rp60 ribu, tapi kalau *fixed broadband* yang Mbps harganya Rp250 ribuan. Harga mahal tapi kapasitas dan kualitas jauh lebih bagus," bebernya.

Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Komunikasi dan Persandian Kota Yogyakarta, Tri Hastana, mengatakan bahwa perkemban-

gan jaringan *fiber optic* (FO) berkembang sangat pesat di Kota Yogyakarta. "FO perkembangannya luar biasa. Ada 7 tiang FO di salah satu pelaku bisnis di Jalan Diponegoro. Belum sampai gas, pipa air minum, dan listrik. Kita pakai prioritas FO karena perkembangan paling masif ada di FO," bebernya.

Ia pun menuturkan, bahwa konsep pengembangan jaringan akan dimulai pada 2019. "Bongkar jalan, sekalian memasang. Sambil merumuskan konsep penataan teknis dan bisnisnya," tuturnya.

Kelik, sapaan akrabnya mengatakan bahwa Kota Yogyakarta sudah harus memulai mengawali pengembangan jaringan karena

kondisi Jogja sebagai kota jasa dan kota wisata harus bisa menjaga semua aspek pada koridor estetik agar tertib dan nyaman.

Sementara itu, Wakil Dekan Fakultas Teknik Universitas Atmajaya, Beni Susanto yang hadir pada kesempatan tersebut, menyampaikan bahwa estetika menjadi modal penting untuk penataan jaringan FO di Kota Yogyakarta.

"Pada pelaksanaan penataan di Kotabaru, banyak kendala. Jaringan bawah tanah di Kota Yogyakarta tidak terdokumentasi dengan baik, sehingga PUPKP mengalami kesulitan. Itu bisa mempersulit pengembangan yang akan datang," ucapnya. (kur)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005